

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Komperatif Pemerintah Kota/Kabupaten Se- Provinsi Jawa Barat Pada Kondisi Sebelum Dan Masa Covid-19 Periode 2019 Dan 2020)

The Influence Of Economic Growth, Regional Origin Income, General Funds On Capital Expenditure Budget Allocation (Comparative Study Of City/Regency Governments In West Java Province Conditions Before And During The 2019 And 2020 Covid-19 Period)

Muhammad Renaldi Alfarizi ¹, Dudi Pratomo,²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung

¹mrenaldialfarizi@student.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan aset berwujud daerah dalam bentuk APBD. Belanja modal dilakukan untuk memberikan fasilitas nyata terhadap publik yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun. Masa pandemi menyebabkan pemerintah harus sigap dan teliti dalam mengalokasikan dana untuk penyerapan APBD. Pemanfaatan APBD yang bagus dapat memicu banyaknya penyerapan anggaran belanja modal, sehingga pemerintah akan lebih banyak biaya untuk memperbanyak aset daerah guna memfasilitasi masyarakat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Anggaran Belanja Modal.

Abstract

The allocation of the Capital Expenditure Budget is intended to increase regional tangible assets in the form of APBD. Capital expenditure is carried out to provide real facilities to the public that can be utilized for more than one year. The pandemic period causes the government to be alert and careful in allocating funds for the absorption of the APBD. A good use of the APBD can trigger a lot of absorption of the capital expenditure budget, so that the government will spend more money to increase regional assets to facilitate the community.

Keywords: Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure Budget.

I. PENDAHULUAN

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan aset berwujud daerah dalam bentuk APBD. Belanja modal dilakukan untuk memberikan fasilitas nyata terhadap publik yang dapat dimanfaatkan lebih dari satu tahun Siagian (2020)^[8]. Masa pandemi menyebabkan pemerintah harus sigap dan teliti dalam mengalokasikan dana untuk penyerapan APBD. Pemanfaatan APBD yang bagus dapat memicu banyaknya penyerapan anggaran belanja modal, sehingga pemerintah akan lebih banyak biaya untuk memperbanyak aset daerah guna memfasilitasi masyarakat Windari & Amelia (2018)^[12]

Tabel 1 Anggaran Belanja Modal Provinsi di Pulau Jawa

	2019	2020	Perubahan
Jawa Barat	17.923,11 M	19.232,05 M	7,3%
Jawa Tengah	15.421,45 M	15.624,36 M	1,32%
Jawa Timur	21.846,05 M	22.705,26 M	3,93%

Sumber: Data telah diolah

Berdasarkan Tabel 1 pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki perubahan anggaran tertinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Masa Pandemi saat ini, pemerintah Jawa Barat justru mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai provinsi dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 terbanyak, pengadaan belanja modal sangat perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar tidak menghabiskan anggaran belanja yang berlebihan. Hal ini disebabkan karena belanja modal sebagai kategori belanja langsung, sehingga perlu di evaluasi kembali pengadaannya sehingga diharapkan pemerintah tetap mempertahankan kinerjanya untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Faktor-faktor yang digunakan dalam mempengaruhi alokasi belanja modal yakni pertumbuhan ekonomi, dimana perekonomian suatu daerah dapat bertumbuh disebabkan oleh penyerapan dana anggaran APBD yang lebih maksimal. Kemudian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh setiap daerah berdasarkan kemampuan daerah dan sebagai faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dimana pendapatan yang dimiliki setiap daerah dapat memicu terjadinya realisasi anggaran belanja modal daerah. Faktor lainnya adalah dana alokasi umum dimana dana yang diberikan untuk dialokasikan secara

umum untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga banyaknya Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Keuangan Daerah

Menurut Kuswandi (2016)^[3] Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2015)^[9] berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan menurut Nurdiwanti, Zaman, & Kristinawati (2017)^[5] adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\% \quad (1)$$

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi Badrudin (2011)^[1]. Pengukuran pendapatan asli daerah yang digunakan menurut adalah sebagai berikut:

$$PAD = \text{Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah} \quad (2)$$

D. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Rumeff (2018)^[6]. Indikator Dana Alokasi Umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DAU = \text{Jumlah Dana Alokasi Umum} \quad (3)$$

E. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengalokasian Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu Dina, Putu, & Ida Ayu Nyoman (2019)^[2] Selanjutnya, perhitungan belanja modal dikategorikan sebagai Anggaran Belanja Modal (ABM) yang dihitung berdasarkan total anggaran belanja modal yang diberikan. Indikator Dana Alokasi Umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ABM : \text{Belanja Modal} \quad (4)$$

F. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan kebijakan pada setiap pemerintah daerah dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang berbeda Dina, Putu, & Ida Ayu Nyoman (2019)^[2]. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Sulaiman (2020)^[10] menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

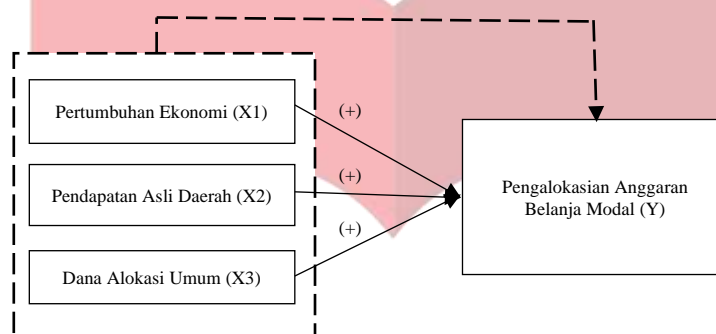
G. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Hal ini

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa, Yuniarta, & Wahyuni (2017)^[7], Sulaiman (2020)^[10] Mundiroh (2019)^[4] juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

H. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mundiroh (2019)^[4] Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani (2019)^[11] yang menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data yang diolah, 2020

Keterangan:

Pengaruh Parsial →

Pengaruh Simultan - - - - - →

I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

H₂: Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

H₃: Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

H₄: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

III. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kota atau Kabupaten. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *sampling* jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Sehingga sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan realisasi anggaran Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019-2020 di yang terdiri dari: 1) Pertumbuhan Ekonomi Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020. 2) Pendapatan Asli Daerah Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020. 3) Dana Alokasi Umum Kota atau Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi *cross section*, menggunakan *software* Eviews versi 11.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Keterangan	ABM	GROWTH	PAD	DAU
Mean	11.6404	0.0117	11.7587	12.0294
Max	12.2583	0.0663	12.4998	12.3344
Min	11.0438	-0.0686	11.0032	11.5462
Std. Deviasi	0.2907	0.0373	0.3654	0.1927

Sumber: Data yang diolah, 2021

Pada tabel 1, tersebut dapat dilihat bahwa data pada variabel Anggaran Belanja Modal memiliki nilai maksimum 12.2583 dan nilai minimum nya sebesar 11.0438. Sedangkan nilai rata-rata Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 11.6404 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.2907, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Anggaran Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) diatas standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

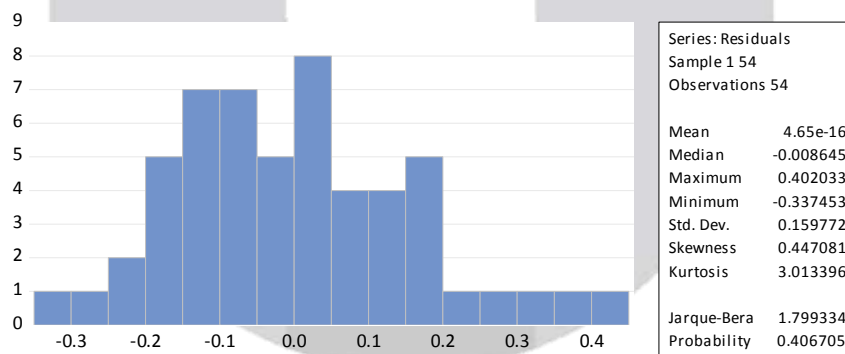
Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai maksimum yaitu 0.0663 dan nilai minimumnya sebesar -0.0686. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.0117 dengan standar deviasi sebesar 0.0373, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai rata-rata (*mean*) dibawah standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut tidak berkelompok atau bervariasi.

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum yaitu 12.4998 dan nilai minimum sebesar 11.0032. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 11.7587 dengan standar deviasi sebesar 0.3654, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasinya, hal ini berarti bahwa variabel tersebut mengelompok atau tidak bervariasi.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum yaitu 12.3344 dan nilai minimum sebesar 11.5462. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) Dana Alokasi Umum adalah sebesar 12.0294 dengan standar deviasi sebesar 0.1927, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasinya, hal ini berarti bahwa variabel tersebut mengelompok atau tidak bervariasi.

B. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual memiliki ditribusi normal. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera. Deteksi data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Probabilitas Jarque-Bera hitung dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$.



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan pada Gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Probability* Jarque-Bera sebesar 0.406705 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikasinya yaitu 0.05. Sehingga, dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas karena Probabilitas Jarque-Bera lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi Alpha ($\alpha = 0.05$).

C. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menilai adakah korelasi atau interkorelasi antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.010377	4012.028	NA
GROWTH	0.407426	1.224659	1.111730
PAD	0.006436	1777.589	1.683525
DAU	0.021861	6314.720	1.589826

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 11, 2021.

Dari Tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Centered VIF untuk semua variabel independen lebih kecil dari 10 (≤ 10). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen pada penelitian ini.

D. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang di pakai untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu penelitian yaitu dengan menggunakan uji *white*.

Tabel 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.292606	Prob. F(9,44)	0.2682
Obs*R-squared	11.29188	Prob. Chi-Square(9)	0.2562
Scaled explained SS	9.745812	Prob. Chi-Square(9)	0.3715

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 11, 2021.

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *EViews 11*. Berdasarkan hasil uji tersebut ditunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* dari *Obs*R-squared* sebesar $0.2562 > (\alpha = 0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

E. Analisis Regresi *Cross Section*

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh hasil antara 2 (dua) perbandingan hasil, yaitu hasil pengujian sebelum terdampak COVID-19 dan hasil pengujian setelah terdampak COVID-19.

Berikut ini adalah hasil analisis regresi *cross section* dengan menggunakan *software Eviews 11*.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi *Cross Section* Sebelum Pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.289170	1.991278	1.149598	0.2621
GROWTH	-0.617180	2.531115	-0.243837	0.8095
PAD	0.493999	0.113179	4.364762	0.0002
DAU	0.297492	0.203010	1.465407	0.1563
R-squared	0.701716	Mean dependent var		11.65765
Adjusted R-squared	0.662809	S.D. dependent var		0.274639
S.E. of regression	0.159478	Akaike info criterion		-0.697868
Sum squared resid	0.584964	Schwarz criterion		-0.505892
Log likelihood	13.42122	Hannan-Quinn criter.		-0.640783
F-statistic	18.03587	Durbin-Watson stat		2.328711
Prob(F-statistic)	0.000003			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, 2021

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Cross Section Sebelum Pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.229767	2.242146	-0.102476	0.9193
GROWTH	1.810164	3.142434	0.576039	0.5702
PAD	0.668236	0.186523	3.582594	0.0016
DAU	0.336287	0.240172	1.400193	0.1748
R-squared	0.707910	Mean dependent var		11.62312
Adjusted R-squared	0.669811	S.D. dependent var		0.310259
S.E. of regression	0.178281	Akaike info criterion		-0.474955
Sum squared resid	0.731037	Schwarz criterion		-0.282979
Log likelihood	10.41189	Hannan-Quinn criter.		-0.417870
F-statistic	18.58094	Durbin-Watson stat		1.728220
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews, 2021

Dari Tabel 5 dan Tabel 6 masing-masing dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.
 $ABM_{2019} = 2.2891 - 0.6171 \text{ GROWTH} + 0.4939 \text{ PAD} + 0.2975 \text{ DAU} + \varepsilon$
 $ABM_{2020} = -0.2298 + 1.8102 \text{ GROWTH} + 0.6682 \text{ PAD} + 0.3363 \text{ DAU} + \varepsilon$

Berdasarkan persamaan ABM_{2019} , dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta (C) hasil pengujian sebesar 2.2891 dengan tingkat probabilitas 0.2621 lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum bernilai 0, maka variabel dependen alokasi belanja modal bernilai 2.2891.
- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi ($\beta_{1,1}$) -0.6172 dengan tingkat probabilitas 0.8095 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah ($\beta_{2,1}$) 0.4939 dengan tingkat probabilitas 0.0002 lebih kecil dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum ($\beta_{3,1}$) 0.2975 dengan tingkat probabilitas 0.1563 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan persamaan ABM_{2020} , dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta (C) hasil pengujian sebesar -0.2297 dengan tingkat probabilitas 0.9193 lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum bernilai 0, maka variabel dependen alokasi belanja modal bernilai -0.2298.
- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi ($\beta_{1,2}$) 1.8102 dengan tingkat probabilitas 0.5702 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah ($\beta_{2,2}$) 0.6682 dengan tingkat probabilitas 0.0016 lebih kecil dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum ($\beta_{3,2}$) 0.3363 dengan tingkat probabilitas 0.1748 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

F. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Pada Tabel 5 nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.6698 sedangkan pada Tabel 6 nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.6628. Artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pengujian sebelum pandemi dan sesudah pandemi dapat mempengaruhi terjadinya alokasi belanja daerah masing-masing sebesar 66,98% dan 66,28%. Selanjutnya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

G. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000002 kurang dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), dan pada Tabel 4.6 juga menunjukkan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000003 kurang dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$). Berarti dari kedua hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi ($\beta_{1,1}$) -0.6172 dengan tingkat probabilitas 0.8095 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah ($\beta_{2,1}$) 0.4939 dengan tingkat probabilitas 0.0002 lebih kecil dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum ($\beta_{3,1}$) 0.2975 dengan tingkat probabilitas 0.1563 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi ($\beta_{1,2}$) 1.8102 dengan tingkat probabilitas 0.5702 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah ($\beta_{2,2}$) 0.6682 dengan tingkat probabilitas 0.0016 lebih kecil dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
- Koefisien regresi Dana Alokasi Umum ($\beta_{1,2}$) 0.3363 dengan tingkat probabilitas 0.1748 lebih besar dari signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

I. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi masing-masing sebesar 1.8102 dan -0.6172 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.5702 dan 0.8095 lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menerima $H_{0,1}$ dan menolak $H_{a,1}$. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan bruto perkapita yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu. Namun, dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal baik kejadian sebelum dan setelah terjadinya pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dijadikan sebagai pedoman utama daerah dalam menentukan nilai anggaran belanja modal. Artinya, daerah memiliki pedoman lain dalam menentukan anggaran belanja modalnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Santosa, Yuniarta, & Wahyuni (2017)^[7] yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

J. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pandemi masing-masing sebesar 0.6682 dan 0.4939 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.0016 dan 0.0002 lebih kecil dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menolak $H_{0,1}$ dan menerima $H_{a,1}$. Pendapatan asli daerah adalah salah satu pendapatan yang digunakan untuk memenuhi belanja daerah, oleh karena itu pemerintah daerah akan mengoptimalkan belanja daerah agar tetap efektif dan efisien. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerahnya, demikian pula dalam pengalokasian belanja yang dibutuhkan daerah. Apabila suatu daerah memiliki jumlah pendapatan yang lebih besar, maka pengalokasian terhadap belanja modal akan lebih besar. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, belanja yang sudah menjadi kebutuhan rutinitas daerah tetap harus terjadi terutama belanja modal yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana daerah. Oleh karena itu, agar tetap dapat melaksanakan itu, pendapatan suatu daerah akan sangat dioptimalkan guna melancarkan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sulaiman (2020)^[7] yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

K. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Koefisien regresi dana alokasi umum sebelum dan sesudah pandemi masing-masing sebesar 0.3363 dan 0.2975 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.1748 dan 0.1563 lebih besar dari nilai signifikansi ($\alpha=0,05$), berarti dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menerima $H_{0,1}$ dan menolak $H_{a,1}$. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Dana alokasi umum di berikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak berpengaruhnya dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa

pemerintah tidak menggunakan dana alokasi umum sebagai sumber pembiayaan modal daerah, melainkan digunakan untuk pembiayaan yang lainnya seperti belanja operasional. Hasil ini sejalan dengan penelitian Santosa, Yuniarta, & Wahyuni (2017)^[7] yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan *software* Eviews versi 9, maka diperoleh kesimpulan Berdasarkan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa, rata-rata nilai total variabel pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat sebesar 0,0117. Sedangkan nilai deviasi yang diperoleh sebesar 0,0373. Standar deviasi yang diperoleh lebih besar dibanding nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa data bervariasi dan tidak berkelompok. Rata-rata nilai total variabel pendapatan asli daerah pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat sebesar 11,7587. Sedangkan nilai deviasi yang diperoleh sebesar 0,3654. Standar deviasi yang diperoleh lebih besar dibanding nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa data tidak bervariasi dan berkelompok. Rata-rata nilai total variabel dana alokasi umum pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat sebesar 12,0294. Sedangkan nilai deviasi yang diperoleh sebesar 0,1927. Standar deviasi yang diperoleh lebih besar dibanding nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa data tidak bervariasi dan berkelompok. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja anggaran modal pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat kondisi sebelum dan masa covid-19 periode 2019 dan 2020. Berdasarkan pengujian secara parsial maka diperoleh hasil yakni pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja anggaran modal pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat kondisi sebelum dan masa covid-19 periode 2019 dan 2020. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja anggaran modal pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat kondisi sebelum dan masa covid-19 periode 2019 dan 2020. Dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja anggaran modal pada pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat kondisi sebelum dan masa covid-19 periode 2019 dan 2020. Dan saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai alokasi belanja modal agar dapat menggunakan variabel lain yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi alokasi belanja modal. Pemerintah Daerah harus memperhatikan alokasi belanja modal yang harus dikeluarkan dengan mengembangkan jenis-jenis pengeluaran belanja modal yang sesuai dengan kepentingan daerah tersebut. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan upaya-upaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah agar dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

REFERENSI

- [1] Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- [2] Dina, S., Putu, K., & Ida Ayu Nyoman, Y. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 53(9), 1689-1699.
- [3] Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintah Daerah. *Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45 (Unisma)*.
- [4] Mundiroh, S. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau) dan dana bagi hasil (dbh) terhadap alokasi belanja modal daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1).
- [5] Nurdiwenty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43-59.
- [6] Rumefi, U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 122-130.
- [7] Santosa, S. W., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Journal Akuntansi*.
- [8] Siagian, A. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Transfer terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 141-158.
- [9] Sukirno, S. (2015). Makroekonomi Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Sulaiman, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- [11] Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.
- [12] Windari, W., & Amelia, Y. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera. *Jurnal Akuntansi Keuangan (Vol. 23, Issue 2)*.